



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 38 Sidoarjo 61254  
Telepon (031) 8670360-2 Faksimile (031) 8670911 email: jatim@bpkp.go.id

Nomor : S-2817/PW13/1/2021  
Hal : Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Triwulan II  
Tahun 2021 di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi  
Jawa Timur  
Lampiran : Satu Berkas

2 Juli 2021

Yth. Sekretaris Utama  
di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan BPKP, dengan ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Triwulan II Tahun 2021 di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Sesma, kami ucapkan terima kasih.

  
Kepala Perwakilan,  
Alexander Rubi Satyoadi  
NIP 19650226 1986031 001

Tembusan:  
Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 38 Sidoarjo 61254  
Telepon (031) 8670360-2 Faksimile (031) 8670911 email: [jatim@bpkp.go.id](mailto:jatim@bpkp.go.id)

Nomor : Lap-67/TU/2021 2 Juli 2021  
Hal : Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Triwulan II  
Tahun 2021 di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi  
Jawa Timur  
Lampiran : 7 (Tujuh) Lampiran

Yth. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur  
di Sidoarjo

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan BPKP, dengan ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Triwulan II Tahun 2021 di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, dengan uraian sebagaimana berikut:

1. Dasar Penugasan

Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor 639/PW.13/1/2021 tanggal 29 Juni 2021 hal Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Triwulan II Tahun 2021.

2. Tujuan Penugasan

Kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan manajemen risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.

3. Ruang Lingkup Penugasan

Kegiatan pemantauan manajemen risiko di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021.

4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

a. Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak 13 risiko. Daftar risiko yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada Lampiran 1.

b. Jumlah usulan risiko dan usulan kode risiko baru tidak ada.


c. Analisis Risiko

1) Jumlah risiko yang belum ada *existing control* sebanyak 1 risiko atau 7,69% dari jumlah/populasi risiko.

- 2) Jumlah risiko yang sudah ada *existing control* namun belum memadai (masih berada di atas selera risiko) sebanyak 3 risiko atau 25% dari jumlah/populasi risiko. Daftar analisis risiko dapat dilihat pada Lampiran 2.
- d. Evaluasi Risiko

Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 3 risiko atau 23,07% dari 13 risiko. Daftar risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada Lampiran 3.
  - e. Kegiatan Pengendalian
    - 1) Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 sebanyak 6 kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 4.
    - 2) Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 sebanyak 8 atau 100% dari 8 kegiatan pengendalian.
    - 3) Kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan sebelum rencana sebanyak 2 yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.
    - 4) Daftar kegiatan pengendalian yang belum terealisasi tidak ada. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 5.
  - f. Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 tidak ada. Daftar pemantauan keterjadian risiko dapat dilihat pada Lampiran 6.
  - g. Pemilik risiko menetapkan selera risiko sebesar 15. Berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran risiko sampai dengan Triwulan II Tahun 2021, jumlah risiko yang berhasil turun ke level yang dapat diterima sebanyak 10 risiko atau 76,92 % dari total risiko yang teridentifikasi.
  - h. Jumlah risiko yang tidak berhasil turun ke level yang dapat diterima sebanyak 3 risiko atau 23,07% dari total risiko yang teridentifikasi.

Atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Korwas P3A  
Selaku Koordinator Pengelola Risiko 



Sudarto  
NIP 19620826 198303 1 001

## ANALISIS AKAR MASALAH

Nama Unit Pemilik Risiko: Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Tahun: 2021

| Kode Risiko | Pernyataan Risiko                           | Why 1   | Why 2  | Why 3   | Why 4   | Why 5 | Akar Penyebab   | Kode Penyebab  |
|-------------|---|---|--|---|---|-------|---|----------------|
| 1           | 2   | 3   | 4  | 5   | 6   | 7     | 8   | 9              |
| PW13.6.16   | Pemotongan anggaran                         | Ketidaktersediaan dana dari Pemerintah (Kementerian Keuangan) | Waktu yang tersedia untuk mengusulkan revisi anggaran cukup pendek   | Rencana anggaran biaya dan dokumen pendukung kebutuhan belanja modal untuk perbaikan bangunan/gedung/rumah dinas tidak dapat dipenuhi dengan cepat                            |   |       | Rencana anggaran biaya dan dokumen pendukung kebutuhan belanja modal untuk perbaikan bangunan/gedung/rumah dinas tidak dapat dipenuhi dengan cepat  | PW13.6.16.MD.1 |
| PW13.5.31   | Kegiatan dukungan tidak selesai tepat waktu | Pegawai tidak masuk kantor, pensiun                           | Pegawai sakit karena terkena Covid-19, melaksanakan tugas di rumah (WFH) saat pemberlakuan PSBB/PPKM, penggantian pegawai yang akan pensiun dengan pegawai baru yang berusia muda tidak seimbang | Protokol kesehatan pencegahan dan penanganan Covid-19 di rumah/di kantor belum memadai, belum disusun laporan atensi kepada pimpinan di Biro SDM tentang permasalahan pegawai | Ketidaktersediaan dana untuk pencegahan dan penanganan covid-19 di kantor, kepedulian pegawai untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan penanganan covid-19 belum memadai, laporan atensi tentang permasalahan pegawai belum menjadi keharusan |       | Ketidaktersediaan dana untuk pencegahan dan penanganan covid-19 di kantor, kepedulian pegawai untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan penanganan covid-19 belum memadai, laporan atensi tentang permasalahan pegawai belum menjadi keharusan | PW13.5.31.MD.1 |

| Kode Risiko | Pernyataan Risiko   | Why 1   | Why 2   | Why 3  | Why 4  | Why 5   | Akar Penyebab   | Kode Penyebab  |
|-------------|---|---|---|--|--|---|---|----------------|
| 1           | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  | 7   | 8   | 9              |
| PW13.5.61   | Pengelolaan arsip/dokumen tidak tertib  | Pegawai fungsional arsiparis tidak melaksanakan tugas sebagai arsiparis, tidak tersedia ruangan arsip sementara di bidang, pengusulan pemusnahan arsip tidak dilakukan secara berkala | Pemindahan arsip in aktif dari bidang ke gudang arsip belum berjalan dengan baik, ruangan arsip di gudang belakang belum dioptimalkan | Peran tugas sekretaris bidang/bagian belum dioptimalkan dalam pengelolaan kearsipan  |  |   | Peran tugas sekretaris bidang/bagian belum dioptimalkan dalam pengelolaan kearsipan   | PW13.5.61.MN.1 |
| PW13.5.27   | Kegagalan BPKP memperoleh nilai A atas hasil evaluasi RB  | Tim Pembangunan ZI menuju WBK tidak berjalan dengan efektif   | Kesibukan anggota Tim Pembangunan ZI menuju WBK melaksanakan kegiatan pengawasan/rutin kantor   | Pencanangan pembangunan ZI menuju WBK dan sosialisasi rencana pembangunan ZI menuju WBK belum dilaksanakan dengan baik dan pengarsipan dokumen pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK belum berjalan dengan baik. | Komitmen anggota tim Pembangunan ZI menuju WBK belum terbentuk dengan baik | Belum ditetapkan target pembangunan ZI menuju WBK oleh BPKP Pusat di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tercapai pada tahun 2021 | Belum ditetapkan target pembangunan ZI menuju WBK oleh BPKP Pusat di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tercapai pada tahun 2021 | PW13.5.27.EX.1 |
| PW13.5.7    | Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) | Penugasan hanya dilakukan PFA tertentu  | Komposisi tim tidak berubah   | Kegiatan PPM tidak berjalan efektif untuk meningkatkan kompetensi  |  |   | Kegiatan PPM tidak berjalan efektif untuk meningkatkan kompetensi   | PW13.5.7.MN.1  |
| PW13.5.18   | Hasil analisis beban kerja dan formasi pegawai tidak menggambarkan beban kerja yang sesungguhnya  | Pengembangan karir lebih cepat dibandingkan perekrutan atau penambahan PFA  | Tidak ada analisis beban kerja Bidang   |  |  |   | Tidak ada analisis beban kerja Bidang   | PW13.5.18.MD.1 |

| Kode Risiko | Pernyataan Risiko   | Why 1   | Why 2   | Why 3   | Why 4  | Why 5 | Akar Penyebab   | Kode Penyebab  |
|-------------|---|---|---|---|--|-------|---|----------------|
| 1           | 2   | 3   | 4   | 5   | 6  | 7     | 8   | 9              |
| PW13.1.12   | Pandemi   | Karyawan tidak percaya adanya pandemi                                 | Karyawan tidak peduli protokol kesehatan                      | Kurang tegasnya penegakan syarat tes bebas Covid-19 bagi karyawan yang melakukan tugas keluar kantor (DL) dan bagi tamu yang berkunjung ke kantor |  |       | Kurang tegasnya penegakan syarat tes bebas Covid-19 bagi karyawan yang melakukan tugas keluar kantor (DL) dan bagi tamu yang berkunjung ke kantor | PW13.1.12.MD.1 |
| PW13.6.3    | Data pengawasan belum di-input ke dalam aplikasi secara rutin                         | Proses input tidak real-time  | SOP tidak jelas   | Koneksi yang tidak stabil   | Sistem SIMA belum terintegrasi secara penuh mulai dari pembuatan ST, pembuatan laporan, sampai penilaian angka kredit dan kinerja PFA. |       | Sistem SIMA belum terintegrasi secara penuh mulai dari pembuatan ST, pembuatan laporan, sampai penilaian angka kredit dan kinerja PFA.            | PW13.6.3.MC.1  |
| PW13.6.8    | Hasil pengawasan tidak digunakan oleh stakeholder                                     | Saran atau rekomendasi yang diberikan tidak relevan                   | Auditor kurang memiliki kompetensi dalam melakukan pengawasan |   |  |       | Auditor kurang memiliki kompetensi dalam melakukan pengawasan   | PW13.6.8.MN.1  |
| PW13.6.2    | Auditi menolak/membatasi penugasan pengawasan(audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan) | Auditee berpandangan bahwa bukan kewenangan BPKP melakukan penugasan. |   |   |  |       | Auditee berpandangan bahwa bukan kewenangan BPKP melakukan penugasan.   | PW13.6.2.EX.1  |
| PW13.2.3    | Aturan/pedoman/kebijakan yang disusun kurang lengkap                                  | Permintaan baru dari auditee yang segera                              | Perubahan lingkungan bisnis yang begitu cepat                 | Waktu yang dibutuhkan untuk menyusun pedoman kurang memadai.  |  |       | Waktu yang dibutuhkan untuk menyusun pedoman kurang memadai.  | PW13.2.3.EX.1  |

## IDENTIFIKASI RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko: Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Tahun: 2021

| No | Jenis Konteks     | Nama Konteks   | Kode Risiko | Pernyataan Risiko   | Uraian Dampak  | Metode Pencapaian Tujuan SPIP     |
|----|-------------------|--|-------------|---|--|-----------------------------------|
| 1  | 2                 | 3  | 4           | 5   | 6  | 7                                 |
| 1  | Going Concern     | Keberlangsungan Entitas BPKP   | PW13.5.2    | Adanya tuntutan hukum terhadap hasil pengawasan                                       | Hasil pengawasan lainnya juga bisa tidak dipercaya stakeholder, yang berdampak terusan pada tidak dipercayanya institusi BPKP yang bisa mengganggu keberlangsungan entitas BPKP. | Kegiatan yang Efektif dan Efisien |
| 2  | Sasaran Strategis | SS 1 : Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah | PW13.6.8    | Hasil pengawasan tidak digunakan oleh stakeholder                                     | tidak dapat memberikan manfaat kepada audite dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara dan daerah.  | Kegiatan yang Efektif dan Efisien |
| 3  | Sasaran Strategis | SS 2 : Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional       | PW13.6.2    | Auditi menolak/membatasi penugasan pengawasan(audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan) | BPKP tidak dapat memberikan rekomendasi strategis untuk peningkatan akuntabilitas pembangunann nasional.   | Kegiatan yang Efektif dan Efisien |
| 4  | Sasaran Kegiatan  | SK 01.3 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan                                     | PW13.6.16   | Pemotongan anggaran   | Belanja modal untuk pemeliharaan gedung/bangunan/rumah dinas tidak terealisasi   | Kegiatan yang Efektif dan Efisien |
| 5  | Sasaran Kegiatan  | SK 01.2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan SDM BPKP                                     | PW13.5.31   | Kegiatan dukungan tidak selesai tepat waktu   | Penyampaian laporan kegiatan ketatausahaan (keuangan, kepegawaian, umum) tidak tepat waktu   | Kegiatan yang Efektif dan Efisien |
| 6  | Sasaran Kegiatan  | SK 01.5 : Terwujudnya tata kelola kearsipan yang tertib                                  | PW13.5.61   | Pengelolaan arsip/dokumen tidak tertib  | Arsip tidak dapat ditemukan dengan cepat, hilang, rusak  | Kegiatan yang Efektif dan Efisien |

| No | Jenis Konteks   | Nama Konteks  | Kode Risiko | Pernyataan Risiko   | Uraian Dampak   | Metode Pencapaian Tujuan SPIP     |
|----|-----------------|---|-------------|---|---|-----------------------------------|
| 1  | 2               | 3   | 4           | 5   | 6   | 7                                 |
| 7  | Sasaran Program | SP 01.6 : Mewujudkan unit kerja percontohan yang bebas korupsi dan mampu memberikan pelayanan publik yg berkualitas | PW13.5.27   | Kegagalan BPKP memperoleh nilai A atas hasil evaluasi RB  | Pembangunan Zona Integritas di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tidak memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) | Kegiatan yang Efektif dan Efisien |
| 8  | Proses Bisnis   | BPKP-01.01 CFM 01 Penyusunan Rencana Strategis  | PW13.2.3    | Aturan/pedoman/kebijakan yang disusun kurang lengkap  | Rencana strategis perwakilan tidak selaras dengan renstra BPKP.   | Kegiatan yang Efektif dan Efisien |
| 9  | Proses Bisnis   | BPKP-08.03 CFM 01 Pelaksanaan Penugasan Consulting  | PW13.5.7    | Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) | Mitra kerja tidak puas atas pelayanan BPKP  | Kegiatan yang Efektif dan Efisien |
| 10 | Proses Bisnis   | BPKP-10.01 CFM 01 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Jabatan dan Formasi SDM  | PW13.5.18   | Hasil analisis beban kerja dan formasi pegawai tidak menggambarkan beban kerja yang sesungguhnya  | Demotivasi kerja  | Kegiatan yang Efektif dan Efisien |
| 11 | Proses Bisnis   | BPKP-02.04 CFM 01 Penataan Budaya Organisasi  | PW13.1.12   | Pandemi   | Terjadinya penularan penyakit Covid-19 (klaster perkantoran)  | Kegiatan yang Efektif dan Efisien |
| 12 | Proses Bisnis   | BPKP-15.01 CFM 01 Perencanaan dan Pengembangan SI/TI  | PW13.6.3    | Data pengawasan belum di-input ke dalam aplikasi secara rutin   | Output dan outcome aplikasi tidak optimal   | Kegiatan yang Efektif dan Efisien |
| 13 | Proses Bisnis   | BPKP-01.02 CFM 03 Penyusunan Rencana Kerja (Renja)  | PW13.2.3    | Aturan/pedoman/kebijakan yang disusun kurang lengkap  | Penyusunan Renja terambat dan kinerja tidak optimal   | Kegiatan yang Efektif dan Efisien |



## ANALISIS RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko: Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Tahun: 2021

| Kode Risiko | Pernyataan Risiko  | Uraian Dampak  | Skor/Nilai Risiko yang Melekat |             |              | Pengendalian yang Ada |                       | Skor/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian |             |              |
|-------------|--|--|--------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--|-------------|--------------|
|             |  |  | Skor Probabilitas              | Skor Dampak | Level Risiko | Jumlah Pengendalian   | Memadai/Tidak Memadai | Skor Probabilitas                                    | Skor Dampak | Level Risiko |
| 1           | 2  | 3  | 4                              | 5           | 6            | 7                     | 8                     | 9  | 10          | 11           |
| PW13.1.12   | Pandemi  | Terjadinya penularan penyakit Covid-19 (klaster perkantoran)   | 3                              | 4           | 17           | 3                     | Memadai               | 2  | 4           | 13           |
| PW13.2.3    | Aturan/pedoman/kebijakan yang disusun kurang lengkap   | Rencana strategis perwakilan tidak selaras dengan renstra BPKP.  | 2                              | 3           | 11           | 2                     | Memadai               | 1  | 3           | 5            |
| PW13.2.3    | Aturan/pedoman/kebijakan yang disusun kurang lengkap   | Penyusunan Renja terambat dan kinerja tidak optimal  | 2                              | 3           | 11           | -                     | -                     | 2  | 3           | 11           |
| PW13.5.18   | Hasil analisis beban kerja dan formasi pegawai tidak menggambarkan beban kerja yang sesungguhnya | Demotivasi kerja   | 3                              | 4           | 17           | 2                     | Memadai               | 3  | 2           | 10           |
| PW13.5.2    | Adanya tuntutan hukum terhadap hasil pengawasan  | Hasil pengawasan lainnya juga bisa tidak dipercaya stakeholder, yang berdampak terusan pada tidak dipercayanya institusi BPKP yang bisa mengganggu keberlangsungan entitas BPKP. | 1                              | 3           | 5            | 1                     | Memadai               | 1  | 2           | 3            |
| PW13.5.27   | Kegagalan BPKP memperoleh nilai A atas hasil evaluasi RB   | Pembangunan Zona Integritas di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tidak memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)  | 4                              | 3           | 16           | 2                     | Memadai               | 3  | 3           | 14           |

| Kode Risiko | Pernyataan Risiko   | Uraian Dampak   | Skor/Nilai Risiko yang Melekat |             |              | Pengendalian yang Ada |                       | Skor/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian |             |              |
|-------------|---|---|--------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--|-------------|--------------|
|             |   |   | Skor Probabilitas              | Skor Dampak | Level Risiko | Jumlah Pengendalian   | Memadai/Tidak Memadai | Skor Probabilitas                                    | Skor Dampak | Level Risiko |
| 1           | 2   | 3   | 4                              | 5           | 6            | 7                     | 8                     | 9  | 10          | 11           |
| PW13.5.31   | Kegiatan dukungan tidak selesai tepat waktu   | Penyampaian laporan kegiatan ketatausahaan (keuangan, kepegawaian, umum) tidak tepat waktu                | 4                              | 4           | 19           | 1                     | Tidak Memadai         | 4  | 4           | 19           |
| PW13.5.61   | Pengelolaan arsip/dokumen tidak tertib  | Arsip tidak dapat ditemukan dengan cepat, hilang, rusak   | 4                              | 3           | 16           | 1                     | Memadai               | 3  | 2           | 10           |
| PW13.5.7    | Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) | Mitra kerja tidak puas atas pelayanan BPKP  | 3                              | 4           | 17           | 2                     | Tidak Memadai         | 3  | 4           | 17           |
| PW13.6.16   | Pemotongan anggaran   | Belanja modal untuk pemeliharaan gedung/bangunan/rumah dinas tidak terealisasi                            | 4                              | 4           | 19           | 1                     | Memadai               | 3  | 3           | 14           |
| PW13.6.2    | Auditi menolak/membatasi penugasan pengawasan(audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan)   | BPKP tidak dapat memberikan rekomendasi strategis untuk peningkatan akuntabilitas pembangunann nasional.  | 1                              | 3           | 5            | 1                     | Memadai               | 1  | 3           | 5            |
| PW13.6.3    | Data pengawasan belum di-input ke dalam aplikasi secara rutin   | Output dan outcome aplikasi tidak optimal   | 4                              | 4           | 19           | 2                     | Tidak Memadai         | 3  | 4           | 17           |
| PW13.6.8    | Hasil pengawasan tidak digunakan oleh stakeholder   | tidak dapat memberikan manfaat kepada audite dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara dan daerah. | 2                              | 2           | 7            | 1                     | Memadai               | 1  | 2           | 3            |